



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN

**PENDAMPINGAN PEMUTAKHIRAN RENCANA INDUK PRRP SUMATERA SEBAGAI
ARAHAN DALAM PEMUTAKHIRAN R3P KABUPATEN/KOTA**

LINGKUP PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilakukan Persidangan (*Desk*) Pendampingan Pemutakhiran Rencana Induk PRRP Sumatera sebagai arahan dalam Pemutakhiran R3P Kabupaten/Kota lingkup Provinsi..... Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui pembahasan Rencana Aksi yang meliputi: (a) Desk Perumahan dan Infrastruktur; serta (b) Desk Sosial, Ekonomi, dan Lintas Sektor.

Berdasarkan hasil pembahasan desk tersebut, para pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan selama 3 tahun (2026-2028) dengan rekapitulasi kegiatan dan anggaran tercantum pada Tabel 1 di bawah ini.
2. Rincian kegiatan dan anggaran masing-masing Kabupaten/Kota tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Kesepakatan ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2026-2028 Lingkup Provinsi ...

No	Sektor	Kategori 1		Kategori 2		Kategori 3		Kategori 4		Total	
		Jumlah kegiatan	Anggaran (Rp)	Jumlah kegiatan	Anggaran (Rp)	Jumlah kegiatan	Anggaran (Rp)	Jumlah kegiatan	Anggaran (Rp)	Jumlah kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perumahan		xxxx.xxx								
2	Infrastruktur		xxxxx.xxx								
3	Ekonomi		xxxxx.xxxx								
4	Sosial										
5	Lintas Sektor										
Total											

Keterangan:

Kategori:

- 1 = Renaksi K/L sesuai dengan kebutuhan JITUPASNA dalam hal volume, lokasi, dan angka kebutuhan
- 2 = Renaksi K/L sesuai dengan kebutuhan JITUPASNA, namun belum sesuai dengan volume, lokasi, dan angka kebutuhan
- 3 = Renaksi K/L ada, tapi tidak terdapat pada kebutuhan JITUPASNA
- 4 = Renaksi K/L tidak ada, namun terdapat kebutuhan JITUPASNA yang merupakan kewenangan/ pendanaan pusat

3. Kementerian/Lembaga berkomitmen untuk:
 - a. Mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kebutuhan pascabencana yang merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan matriks terlampir;
 - b. Mengintegrasikan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga selama periode tahun anggaran 2026-2028;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdampak berkomitmen untuk:
 - a. Melakukan pemutakhiran Dokumen R3P dengan mengacu kepada Dokumen Renduk PRRP terkait muatan Peta Zona Rawan Bencana dan kebijakan strategis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Mengintegrasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah selama periode tahun anggaran 2026-2028;
 - c. Mengutamakan pendekatan pembangunan yang tangguh bencana, inklusif, dan berkelanjutan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
5. Kebutuhan pascabencana dalam R3P Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang belum tercantum dalam Rencana Aksi Kementerian/Lembaga namun memiliki urgensi tinggi, akan menjadi pertimbangan bagi Kementerian/Lembaga dalam melakukan pemutakhiran Renaksi Kementerian/Lembaga pada periode tahun anggaran 2026-2028.
6. Pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

Berita acara kesepakatan ini disusun sebagai bentuk komitmen bersama dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Provinsi selama periode tahun anggaran 2026-2028, serta menjadi dasar koordinasi secara terpadu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 11 Maret 2026

Pemerintah Provinsi ...	
Bappeda Provinsi ... Nama: Jabatan: NIP:	
BPBD Provinsi ... Nama: Jabatan: NIP:	
Pemerintah Kabupaten/Kota	
Bappeda Kab/Kota ... Nama: Jabatan: NIP:	
BPBD Kab/Kota ... Nama: Jabatan: NIP:	
Dst ...	
Kementerian PPN/Bappenas	
(nama pimpinan desk) (jabatan/unit kerja)	
(nama perwakilan direktorat sektor) (jabatan/unit kerja)	
(nama perwakilan direktorat sektor) (jabatan/unit kerja)	
Dst ...	
Kementerian/Lembaga termasuk Tim Pendamping Daerah	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan	

Kewilayahan	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Dalam Negeri	
(nama perwakilan K/L) Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
(nama perwakilan K/L) Badan Pusat Statistik	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Pekerjaan Umum	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Perhubungan	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
(nama perwakilan K/L) Badan Informasi Geospasial	
(nama perwakilan K/L) Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara	
(nama perwakilan K/L) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	

(nama perwakilan K/L) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Kehutanan	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Lingkungan Hidup Kesehatan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Pertanian	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Perindustrian	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Kelautan dan Perikanan	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Perdagangan	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Sosial	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
(nama perwakilan K/L) Kementerian Kesehatan	

<i>(nama perwakilan K/L)</i> Kementerian Agama	
---	--